

## Pengawasan Investasi Kripto Kok Masih Kendor

Tanggal : Rabu , 16 Juni 2021

Media : Rakyat Merdeka

Halaman : 10

Wartawan : dwi

Muatan Berita : Positif

Narasumber : A Deni Daruri (*Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC)*), Anto Prabowo (*Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK*), Wimboh Santoso (*Ketua Dewan Komisioner OJK*)

Rubrik : Corporate & E-Commerce

Topik : Kripto

### Transaksinya Salip Bursa Saham

# Pengawasan Investasi Kripto Kok Masih Kendor

Tren investasi uang *cryptocurrency* alias kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan Binance Coin, kian berkembang pesat di Tanah Air. Bahkan, perdagangannya, mengalahkan transaksi di pasar saham dan pasar keuangan lain. Sayangnya, pengawasan terhadap investasi itu masih kendor.

PRESIDEN Center of Banking Crisis (CBC) A Deni Daruri mempertanyakan pengawasan regulator terhadap investasi kripto. Sebab, potensi perdagangan kripto cukup besar.

Deni mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), transaksi aset kripto sepanjang Januari-April 2021 tembus Rp 237 triliun. Jumlahnya naik 400 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara, perkembangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi Indeks Harian Saham Gabungan (IHSG) di periode yang sama berada di kisaran yang jauh lebih rendah, yakni Rp 9 triliun hingga Rp 20 triliun.

"Namun sayang koordinasi dan kerja sama antara regulator keuangan di Indonesia, dalam mengawasi melonjaknya investasi aset kripto, masih kendor," kritik Deni dalam keterangannya, kemarin.

Padahal, menurutnya, pengawasan perdagangan kripto sangat penting. Terutama dalam aspek *knowledge sharing in-*

*dustry*. Selain itu, pengawasan juga bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen dan pemahaman fundamental terhadap produk investasi. Di mana para regulator memiliki peran besar, dalam membuat kebijakan yang dapat bersifat pengawasan dan pencegahan.

"Sekarang ini masih banyak menyakan cukup ruang untuk terus mengembangkan inovasi teknologi di dalam industri aset kripto," tutur Deni.

Karena hal ini, lanjutnya, dapat berkontribusi positif terhadap daya saing industri keuangan Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Terutama dalam menghadapi persaingan global di era ekonomi digital.

Di mata Deni, lembaga pengawas sektor keuangan belum satu suara terhadap investasi kripto. Bahkan, cenderung memiliki pandangan yang berseberangan.

Misalnya saja, akhir-akhir ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memberikan peringatan mengenai bahaya investasi aset kripto. Karena, nilai investasi yang rentan fluktuatif, tidak memiliki *underlying asset*, dan tidak

berada dalam pengawasan OJK. "Banyak kalangan berpandangan ini merupakan sebuah blunder. Karena aset kripto memiliki analisa fundamental investasi yang berbeda dengan saham," tegasnya.

Ditambah lagi, penggunaan teknologi *blockchain* yang terdesentralisasi, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Dan, otoritas penuh berada di tangan komunitas dan pemilik aset kripto, yang memang ditujukan untuk menghilangkan *middleman* pengawasan yang sering memiliki *trust issue*.

Berbeda dengan OJK, lanjut Deni, Bappebti malah menyatakan, akan segera meluncurkan bursa kripto *Digital Future Exchange*, bersama dengan perusahaan *exchange* yang dibawahinya. Tidak menutup kemungkinan pendirian bursa merupakan dorongan tekanan dari para anggota *exchange*. Dan, hal itu dilakukan tanpa koordinasi dengan lembaga pengawasan keuangan lain.

"Terutama terkait dengan kebijakan *know your customer* dan *due diligence*, bursa kripto dapat meningkatkan risiko kejahatan keuangan seperti pencucian uang, penggelapan dana dan fraud," ungkapnya.

Sementara BI, lanjut Deni, menyatakan tidak buru-buru melibatkan mata uang digital

yang disebut dengan *Central Bank Digital Currency (CBDC)*, yang menggunakan teknologi yang mirip atau sama dengan aset kripto.

Deni berharap, lembaga pengawasan keuangan segera duduk bersama untuk membuat regulasi bersama yang konsisten dan selaras. Demi menjawab perkembangan aset kripto yang lebih cepat dari kesiapan para regulator. "Khususnya dalam mendorong terbangunnya sinergi dan koordinasi antara OJK, Bappebti dan BI," imbuhnya.

Terkait ini, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo tidak secara gamblang mengiyakan lembaganya ikut mengatur regulasi kripto. Namun ia menegaskan, wewenang utama berada di bawah komando Bappebti.

"Kripto ini bukan wilayah OJK. Kripto sepenuhnya wewenang Bappebti," singkat Anto saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui, Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai aset kripto. Namun, menurutnya, Indonesia memang membutuhkan regulasi yang pasti mengenai aset kripto.

"Kami sudah bicara dengan Menteri Perdagangan maupun Bappebti, agar segera melakukan

(pembicaraan soal regulasi). Ini kejelasannya bagaimana dan itu (kripto) mestinya harus diatur dalam Undang-Undang secara jelas," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR, kemarin.

Wimboh menegaskan, meskipun Bappebti memberikan izin perdagangan aset kripto sebagai komoditas, namun BI tidak mengakuinya sebagai mata uang. Saat ini mata uang yang sah digunakan sebagai alat transaksi adalah rupiah.

Mantan Komisaris Bank Mandiri ini menggambarkan penguatan aset kripto nanti, bakal serupa dengan perdagangan di pasar modal. Setidaknya perdagangan kripto memiliki *Self Regulatory Organizations (SRO)*, *settlement* transaksi, hingga kaidah perlindungan konsumen. Hal ini lantaran perdagangan aset kripto sangat fluktuatif.

Menurutnya, sejumlah negara resmi melarang transaksi aset kripto. Sedangkan, sebagian negara melegalkannya, dan memilih tidak melarang alias tidak melegalkan.

"Beberapa negara ini yang masyarakatnya sudah *well literated* (litasasinya sektor keuangan bagus). Sehingga kalau hilang duitnya, dia diam saja, tidak pernah komplain. Tapi kalau di Indonesia kayaknya beda, sehingga ini yang perlu kami bahas bersama," ucapnya. ■ DWI